

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Brotodihardjo, Santoso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Djafar Saidi, Muhammad, 2008, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ilyas, Wirawan B., Richard Burton, 2008, *Hukum Pajak*, Edisi 4, salemba Empat, Jakarta.
- Judisseno, Rimsky K., 2002, *Pajak dan Strategi Bisnis*, Edisi Revisi Tahun 2002, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mardiasmo, 2006, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi Offset, Jakarta.
- Mahfud, Moh., 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Mustaqiem, 2008, *Pajak Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Nurmantu, Safitri, 2003, *Pengantar Perpajakan*, Edisi 2, Jakarta.
- Prastowo, Yustinus, 2009, *Panduan Lengkap Pajak*, RAS, Jakarta.
- Soekanto, Soerdjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat, 1992, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Eresco, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1982, *Pajak dan Pembangunan*, Bandung.

Sumyar, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Pajak*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta.

Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas, 2003, *Perpajakan Indonesia Edisi 1*, Salemba Empat, Jakarta.

Yusi, H.M. Syahirman, & Idris, Umiyati, 2009, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kuantitatif*, Citrabooks Indonesia, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Rokok.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan.

**C. Jurnal :**

Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Universitas Gorontalo, Vol.12, No.3, September 2012.

Robert Carling, “Tax Earmarking :Is it Good Practice?”, *Journal of The Center for Independent Studies*, 2007.

Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal, “Policy Brief”, *Earmarking APBN dan APBD*, Ringkasan, 2012.

William Mc Cleary, ”The Earmarking of Government Revenue. A Review of some world Bank Experience”.*The World Bank Research Observer*, Vol. 6, No. 1, 1991.

**D. Internet :**

<http://www.koran-sindo.com/read/1007456/151/yogya-peringkat-4-perokok-nasional-1433128312> diakses pada hari Rabu, 3 Juni 2015 pukul 21.05 WIB.